

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Penguanan sektor pangan merupakan salah satu aspek krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengembangan dalam sektor pertanian mengutamakan ketahanan pangan lokal, akses pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemberdayaan petani lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa krisis. Pertanian juga memainkan peran kunci dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan ketahanan lingkungan. Meski memiliki potensi besar, sektor pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah alih fungsi lahan, minimnya akses irigasi modern, ketergantungan pada pupuk kimia, serta dampak perubahan iklim yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Namun demikian, munculnya inovasi seperti pertanian presisi, pemanfaatan teknologi digital, serta intervensi dari pemerintah melalui program-program strategis membuka peluang besar bagi petani dalam meningkatkan produktivitas petani.

Sektor pertanian adalah inti dari perekonomian Kabupaten Ponorogo, dengan padi sebagai komoditas utama yang mendominasi hasil pertanian.

Luas Panen dan Produksi Padi	Luas Panen dan Produksi Padi	
	2019	2020
Luas Panen (Ribu Hektar)	58.08	65.07
Produksi Padi (Ribu Ton-GKG)	322.21	377.33
Produksi Beras (Ribu Ton-Beras)	185.09	216.76

Gambar 1.1. Luas Panen Dan Produksi Padi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2020

Sumber : BPS.2021

Menurut SaThierbach et al., (2021) data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hasil padi di Ponorogo mencapai ratusan ribu ton setiap tahun, dengan luas panen yang terus bertambah dari sekitar 58 ribu hektar pada 2019 menjadi lebih dari 68 ribu hektar pada 2021. Produksi padi di tahun 2021 mencapai sekitar 404,66 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan Ponorogo sebagai salah satu sumber pangan utama di Jawa Timur, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan baik regional maupun nasional. Kesuksesan ini juga terlihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ponorogo, yang mencapai triliunan rupiah, menunjukkan peran penting pertanian dalam ekonomi daerah.

Selain beras, jagung dan ubi juga merupakan komoditas penting dalam pola tanam di Ponorogo, namun beras tetap menjadi komoditas utama dengan produktivitas dan luas lahan tertinggi (Nu'man, 2023).

Menurut Amanda, (2020) berita yang dipublikasi pada republika.com menyatakan bahwa walaupun Ponorogo menunjukkan hasil produksi yang memuaskan, para petani di kawasan ini menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi peningkatan produktivitas. Pertama, perubahan iklim menimbulkan ketidakpastian dalam masa tanam dan ketersediaan air, yang berdampak pada jadwal penanaman dan hasil panen. Kedua, konversi lahan akibat pembangunan infrastruktur dan urbanisasi mengecilkan luas lahan pertanian yang produktif. Ketiga, kekurangan sumber daya air menjadi tantangan utama, khususnya pada musim kemarau, sehingga pemerintah harus meningkatkan infrastruktur irigasi dan sumur bor untuk memastikan pasokan air bagi sawah.

Petani menghadapi beragam permasalahan yang menimbulkan kecemasan mendalam. Permasalahan klasik seperti kelangkaan dan tingginya harga pupuk, terbatasnya akses terhadap alat dan mesin pertanian, minimnya pelatihan dan pendampingan, serta ketergantungan pada tengkulak untuk pemasaran hasil panen menjadi kendala serius bagi upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Situasi ini diperparah oleh semakin

menyempitnya lahan pertanian, perubahan iklim yang tidak menentu, dan fluktuasi harga komoditas yang kurang menguntungkan. Banyak petani mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah dalam memberikan solusi nyata atas tantangan-tantangan tersebut. Kecemasan ini pada akhirnya menjadi aspirasi kolektif di kalangan petani, yang menuntut adanya program-program terobosan yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup mereka.

Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memperkenalkan Program Pertanian Hebat sebagai salah satu dari sembilan program prioritas pembangunan daerah (*Nawa Dharma Nyata*) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Program ini menekankan pada pengembangan infrastruktur pertanian, termasuk konstruksi sumur dalam dan sistem irigasi yang memastikan pasokan air selama setahun penuh, sehingga petani dapat menanam padi dengan lebih intensif dan berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah memberikan bantuan melalui penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk mempercepat proses tanam dan panen, serta distribusi pupuk dan benih berkualitas yang sesuai dengan kondisi setempat. Program ini pun mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, termasuk teknik persemaian luar lahan yang mempercepat waktu tanam usai panen, sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga 3,5 kali tanam dalam dua tahun di beberapa wilayah seperti Babadan (Merdeka, 2025).

Program *Nawa Dharma Nyata* merupakan sembilan program unggulan Bupati Ponorogo yang menjadi arah kebijakan Misi Kedua RPJMD strategis daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat karena tercantum secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026. Secara khusus, *Nawa Dharma Nyata* merupakan turunan langsung dari, yaitu: “*Mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah yang didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.*” Oleh karena itu, sembilan program ini bukan hanya visi politik kepala daerah,

tetapi telah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat mengikat dan terukur.

Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani merupakan kunci sukses program ini, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Pelaksanaan Program Pertanian Hebat telah memberikan efek positif yang besar terhadap hasil pertanian petani di Kabupaten Ponorogo. Keberhasilan ini terlihat pada peningkatan frekuensi tanam dan efisiensi penggunaan lahan, di mana beberapa wilayah dapat melaksanakan hingga tujuh musim tanam dalam dua tahun. Faktor lain yang mendukung adalah terjadinya kesuburan lahan, penggunaan jerami sebagai sumber hara, serta tersedianya pompa air yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga mutu pengelolaan pertanian secara keseluruhan. Walaupun hasil program sudah terlihat, diperlukan analisis menyeluruh tentang pelaksanaan Program Pertanian Hebat untuk mengetahui unsur-unsur yang mendukung dan menghalangi realisasi program di lapangan. Studi ini krusial untuk menilai efisiensi program dalam kerangka kenyataan petani, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan teknis.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran kebijakan yang lebih efisien agar program dapat terus dioptimalkan dan berkelanjutan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam rekomendasi kebijakan antara lain adalah peningkatan efektivitas manajemen distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan bagi petani agar mampu mengadopsi teknologi pertanian terbaru, serta pengembangan sistem irigasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Melalui upaya tersebut, diharapkan program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas hasil pertanian semata, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas petani secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Urgensi penelitian ini menjadi semakin nyata mengingat sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang sangat strategis sebagai penopang utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan mayoritas masyarakat.

Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang tinggi melalui pelaksanaan Program Pertanian Hebat sebagai salah satu upaya inovatif untuk meningkatkan hasil panen petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Namun, di tengah besarnya potensi sektor pertanian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani, serta ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu pola tanam dan hasil produksi.

Namun, Program Pertanian Hebat tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas petani di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan fokus penelitian dan memperjelas ruang lingkup kajian, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pertanian Hebat yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan produktivitas petani, ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat berdasarkan keempat variable dalam teori Implementasi Kebijakan George C Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan program dalam meningkatkan produktivitas petani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini berjutuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Pertanian Hebat yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan produktivitas petani dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, khususnya model George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Pertanian Hebat berdasarkan keempat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang mempengaruhi keberhasilan program dalam meningkatkan produktivitas petani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George c. Edward III, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi studi-studi lanjutan yang ingin menganalisis kebijakan berbasis intervensi pemerintah daerah dalam konteks produktivitas pertanian.

2. Manfaat Praktik/Akademik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat sejauh mana Program Pertanian Hebat telah diimplementasikan secara efektif, sekaligus memberikan masukan dalam menyusun kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- b. Bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Dan Peternakan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami

- hambatan dan potensi dalam pelaksanaan program, serta menjadi acuan untuk perbaikan distribusi sumber daya.
- c. Bagi Kalangan Akademik, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan studi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan inovasi kebijakan daerah dan kesejahteraan pertanian.
 - d. Bagi Petani, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas peran mereka dalam kebijakan daerah serta meningkatkan pemahaman terhadap program yang ditujukan bagi produktivitas mereka.

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini memiliki kejelasan konsep dan tidak terjadi penafsiran yang beragam terhadap istilah yang digunakan, maka peneliti merasa perlu untuk menjelaskan pengertian beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Secara umum implemetasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, ide, kebijakan, dan konsep yang menjadi tindakan nyata. Implementasi merupakan proses mewujuk sesuatu yang direncanakan menjadi kenyataan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan alat untuk mewujudkan/melaksanakan tujuan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan melalui keputusan politik. Meskipun begitu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan secara umum merujuk pada proses penerapan atau implementasi suatu kebijakan, program, atau rencana yang telah disusun sebelumnya agar hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Menurut Nu'man, (2023) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses yang rumit dalam menerapkan kebijakan, melibatkan

berbagai aktor dan faktor yang saling berhubungan. Mereka menyoroti betapa pentingnya koordinasi, komunikasi, dan sumber daya yang cukup agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan bukan sekadar melaksanakan kebijakan, namun juga mengenai cara kebijakan itu diadaptasi dan diterapkan di lapangan agar dampak positif dapat dirasakan.

Dalam konteks studi mengenai program pertanian, pelaksanaan meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara program, mulai dari penafsiran kebijakan, pengaturan sumber daya, hingga pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan. Menurut Haedar Akib, (2010) proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau program yang melibatkan tindakan nyata oleh pelaksana kebijakan dengan memperhatikan kesesuaian program, kapasitas organisasi, dan kebutuhan kelompok sasaran, serta memerlukan koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Nawa Dharma Nyata

“Nawa Dharma Nyata”, diambil dari Bahasa Sanskerta dengan penjabaran maknanya, “Nawa” berarti sembilan, “Dharma” berari kewajiban/aturan/pengabdian/kebenaran, “Nyata” berarti terwujud. Secara keseluruhan Nawa Dharma Nyata diartikan sebagai sembilan program unggulan yang wajib atau benar-benar diwujudkan secara nyata. Sembilan prioritas program yang dirintis oleh Bupati Ponorogo sebagai manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan dalam lima tahun ke depan (2024-2029). Program ini mencangkup berbagai sektor strategis seperti pertanian hebat, masyarakat dan perempuan hebat, pariwisata hebat, ekonomi dan keuangan hebat, pendidikan hebat, kesehatan hebat, infrastruktur dan lingkungan hidup hebat, birokrasi hebat, serta desa hebat

sebagai pilar utama pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada sektor pertanian, yang menjadi salah satu pilar utama dalam Nawa Dharma Nyata di bidang pertanian yang dipandang krusial karena sebagian besar masyarakat Ponorogo menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian. Melalui program pertanian hebat pemerintah daerah mampu mewujudkan misi bupati dalam menciptakan Ponorogo yang hebat dan unggul.

Program Pertanian Hebat yang dimaksud adalah salah satu dari 9 program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari Nawa Dharma Nyata, yang bertujuan untuk melakukan revitalisasi pertanian agar produktivitas petani semakin meningkat. Dalam program Pertanian Hebat ini, pemerintah berkomitmen menjadikan Ponorogo menuju kabupaten organik, dimana sistem pertanian yang ramah lingkungan menjadi prioritas. Upaya lain yang dikedepankan adalah pembangunan irigasi air tanah dalam/sumur tanah sebagai solusi kebutuhan air untuk pertanian. Ketahanan pangan juga diperkuat melalui program berbagai program, termasuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bersifat partisipatif melibatkan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah lembaga eksekutif di tingkat kabupaten yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Daerah terdiri dari Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD, yang berkolaborasi dalam menjalankan fungsi legislatif serta eksekutif di wilayah tersebut. Namun, dalam hal pelaksanaan program, fokus penelitian ini merujuk pada peran eksekutif, yakni Bupati dan perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta instansi teknis lainnya, yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan Program Pertanian Hebat.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki kekuasaan berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam kapasitasnya sebagai penyusun, pelaksana, dan pengawas kebijakan pertanian daerah, khususnya dalam Program Pertanian Hebat.

4. Produktivitas Petani

Dalam penelitian ini, istilah produktivitas merujuk pada kemampuan petani dalam menghasilkan output pertanian secara optimal melalui pemanfaatan berbagai sumber daya produksi yang tersedia, termasuk lahan, tenaga kerja, teknologi, sarana prasarana pertanian, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Produktivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil panen baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang tercermin dari peningkatan jumlah produksi per satuan luas lahan, efisiensi penggunaan input seperti bibit, pupuk, dan pestisida, serta penerapan metode budidaya dan teknologi yang lebih modern dan tepat guna. Dalam konteks implementasi Nawa Dharma Nyata di Kabupaten Ponorogo, produktivitas tidak hanya dipandang sebagai output fisik semata, tetapi juga sebagai indikator efektivitas program pemerintah dalam memperkuat kapasitas petani, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta mendorong transformasi praktik pertanian menuju pola yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas

dalam penelitian ini menegaskan sejauh mana intervensi kebijakan daerah mampu memperbaiki kinerja usaha tani dan mendukung peningkatan produktivitas petani melalui peningkatan hasil pertanian yang lebih optimal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap studi terdahulu yang relevan dengan judul ini penting dilakukan, untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan public di sektor pertanian telah dikaji dari berbagai pendekatan, baik secara konseptual maupun melalui studi kasus di berbagai daerah. Penelitian oleh Muhammad et al., (2024) yang berjudul *Meningkatkan Kesejahteraan Petani : Menuju Sektor Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing di Indonesia* menunjukkan bahwa pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu produktivitas yang rendah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar, dampak perubahan iklim, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai hal dalam mengatasi tantangan tersebut diantaranya, mengimplementasikan berbagai strategi dan regulasi meliputi peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan, memperkuat akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar, meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim, melindungi lahan pertanian, serta mengembangkan agroindustri dan diversifikasi produk pertanian. Penelitian ini terdapat kesenjangan karena fokus pada implementasi Program Pertanian Hebat di tingkat lokal (Kabupaten Ponorogo) dengan pendekatan teori Edwards III, sementara pada artikel Muhammad et al., (2024) hanya membahas strategi pertanian secara umum di tingkat nasional tanpa analisis implementasi kebijakan secara spesifik.

Sedangkan pada artikel DPR RI, (2015) yang berjudul *Permasalahan Dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian* menunjukkan bahwa Indonesia masih tergantung pada impor, petani Indonesia juga masih miskin dan banyak usia produktif meninggalkan pertanian. Permasalahan tersebut

dikarenakan 3 aspek diantaranya, aspek geografi, dimana Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua, aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah yang kurang pro-petani. Ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang tidak tepat sasaran, serta target RPJMN yang tidak pernah tercapai. Pada artikel tersebut belum mengulas secara spesifik implementasi program pertanian di daerah tertentu. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis implementasi Program Pertanian Hebat di Kabupaten Ponorogo menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan terfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Selanjutnya, penelitian oleh Jati et al., (2022) yang berjudul *Implementasi Program Petani Bangkit Guna Meningkatkan Pendapatan Petani di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program petani bangkit di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin sudah sesuai prosedur, namun belum optimal. Dan pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan dampak baik dalam meningkatkan pendapatan petani yang merupakan tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih terdapat hambatan-hambatan di lapangan, antara lain sarana prasarana pengembangan pertanian masih belum optimal, ketersediaan pupuk subsidi belum terjamin dan adanya miskomunikasi antara implementor dengan petani. Sejauh ini Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin hanya sosialisasi dan evaluasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan program petani bangkit tersebut. Pada penelitian implementasi Program Petani Bangkit di Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan teori Weimer dan Vining, menekankan pada logika kebijakan, tempat kebijakan dijalankan, dan kemampuan implementor. Fokus utamanya adalah peningkatan pendapatan petani serta tantangan seperti miskomunikasi, keterbatasan infrastruktur, dan pemanfaatan lahan yang belum optimal. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus berbeda, yaitu menganalisis implementasi Program Pertanian Hebat di Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang baru melalui analisis empat faktor utama implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta memberikan gambaran yang lebih sistematis terhadap efektivitas program di tingkat daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hamid, (2018) yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan* menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi untuk pemberdayaan petani padi yang secara operasional dilaksanakan oleh para Penyuluhan Petani Lapangan (PPL) telah berjalan cukup baik yang ditandai adanya peningkatan produksi padi sawah dalam 2 tahun terakhir (2013-2015) yaitu sebesar 16,6%. Hal tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan seperti, sekolah lapang pengelolaan tanaman padi, pengadaan alat dan mesin pertanian, program pengembangan usaha agrobisnis pedesaan, pengembangan optimalisasi lahan, peningkatakan produksi melalui budidaya padi, pemberdayaan petani penangkar dengan bantuan benih pokok, Pembangunan dan perbaikan beberapa jaringan irigasi, perbaikan administrasi kelompok tani, dan pembuatan jalan usaha tani. Namun, kegiatan tersebut juga masih terhambat karena beberapa faktor antara lain, kondisi jaringan irigasi yang belum memadai untuk mengairi seluruh sawah yang ada, ketersediaan sarana produksi pertanian khususnya benih padi unggul dan pupuk masih mengalami keterlambatan dan jumlahnya belum mencukupi, ketersediaan alat dan mesin pertanian belum seimbang dengan luas area persawahan yang menyebabkan pengolahan lahan sering terhambat. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan petani secara umum tanpa menggunakan teori implementasi kebijakan secara sistematis. Sementara itu, penelitian implementasi Program Pertanian Hebat di Ponorogo dikaji dengan pendekatan teori George C. Edwards III, sehingga memberikan analisis yang lebih terarah terhadap efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian selanjutnya oleh Latif et al., (2022) terkait dengan *Hubungan Peran Penyuluhan Pertanian terhadap Produktivitas Petani Padi di Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru* menyimpulkan bahwa terdapat

hubungan antara peran penyuluhan terhadap peningkatan produktivitas petani. Penyuluhan mempunyai peran sebagai motivator dan fasilitator. Penyuluhan dalam hal ini berperan sebagai sistem pendukung dimana penyuluhan sebagai seorang yang membimbing petani dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi. Peran ini akan menjadi penting apabila petani masih enggan menggunakan faktor fisik seperti peningkatan faktor produksi dan adaptasi teknologi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati, (2020) terkait adaptasi teknologi. Penelitian yang berjudul *Smart Farming 4.0 Untuk Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, Dan Modern* menunjukkan bahwa petani perlu menerapkan sistem smart farming 4.0 dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Petani produktif dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan smart farming membantu mengubah perilaku petani dalam pengelolaan usaha tani seperti praktik pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan, pengairan, penyiraman, penyemprotan pestisida sehingga proses budi daya agar makin efektif dan dapat meningkatkan hasil produksi. Namun, di Indonesia dalam menerapkan smart farming 4.0 masih menjadi tantangan tersendiri, mengingat tingkat Pendidikan para petani relatif rendah, ditambah dengan kebiasaan para petani terdahulu yang masih menerapkan pola budidaya warisan leluhur, dan juga karakteristik lahan pertanian yang beragam, serta petani yang didominasi usia tua (aging farmers) menyebabkan penerapan smart farming 4.0 menghadapi tantangan yang berat. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Rachmawati berfokus pada peran penyuluhan terhadap produktivitas petani secara individual, tanpa menelaah implementasi kebijakan secara utuh. Sementara itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan Program Pertanian Hebat sebagai kebijakan daerah dengan pendekatan teori George C. Edwards III, sehingga lebih menekankan pada evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Penelitian selanjutnya oleh Saputra, (2025) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang mencakup pengajuan tujuan program yang jelas, penyusunan perencanaan

yang terarah, dan penciptaan program yang berkelanjutan. Meskipun langkah-langkah tersebut juga tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Penelitian Rahmat Saputra menjelaskan bahwa tekanan politik dan kepentingan tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan program yang merata. Tantangan lain dalam implementasi kebijakan terhadap petani juga disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan pengalokasian yang lebih didahului untuk kepentingan politik, sehingga kemampuan pemerintah dalam menyediakan program pendukung dan bantuan teknis kepada para petani masih terbatas. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan menuju lahan pertanian, irigasi yang tidak optimal terutama di wilayah yang bukan menjadi basis politik bupati terpilih, sehingga menghambat produktivitas dan distribusi hasil pertanian. Penelitian tentang implementasi kebijakan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan memberikan gambaran umum tentang upaya pemerintah daerah dalam sektor pertanian, namun belum mengkaji secara mendalam keterlibatan aktor pelaksana dan hambatan teknis di lapangan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih terfokus melalui studi kasus Program Pertanian Hebat di Ponorogo, serta menganalisis proses implementasinya menggunakan teori George C. Edwards III, sehingga mampu mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat operasional.

Sedangkan penelitian oleh Martadona & Elhakim, (2020) yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani terhadap Keberhasilan Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kota Padang*” menunjukkan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis karakteristik petani yang memegaruhi keberhasilan implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable umur, pendidikan, sikap terhadap perubahan, pengalaman usaha tani, dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program. Penelitian ini fokus pada partisipasi petani dan karakteristik individu dalam keberhasilan pelaksanaan program nasional AUTP, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan secara sistematis dan tidak menganalisis secara mendalam peran aktor pelaksana atau struktur birokrasi.

Dari keseluruhan artikel yang telah direview, tampak bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pemberdayaan petani, peran penyuluh, faktor sosial-ekonomi, dan partisipasi petani dalam program pertanian secara umum maupun program nasional seperti AUTP. Sebagian menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sebagian lainnya hanya memberikan deskripsi tanpa landasan teori implementasi kebijakan yang kuat. Selain itu, banyak di antaranya tidak meneliti secara spesifik implementasi satu program daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Program Pertanian Hebat di Kabupaten Ponorogo sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas petani. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan mendalam, dengan menilai empat faktor utama dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya melengkapi kekurangan dari studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam menilai keberhasilan kebijakan pertanian di tingkat lokal berdasarkan teori yang teruji secara akademik.

G. Landasan Teori

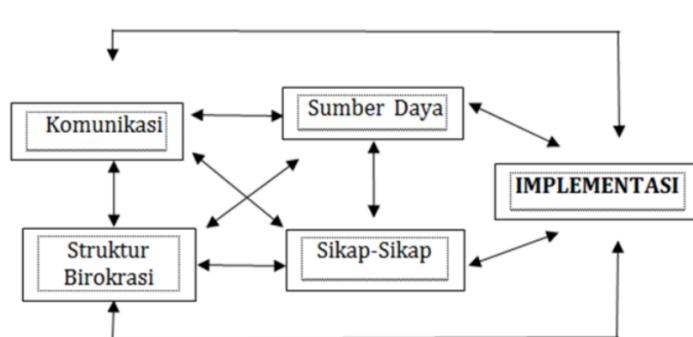
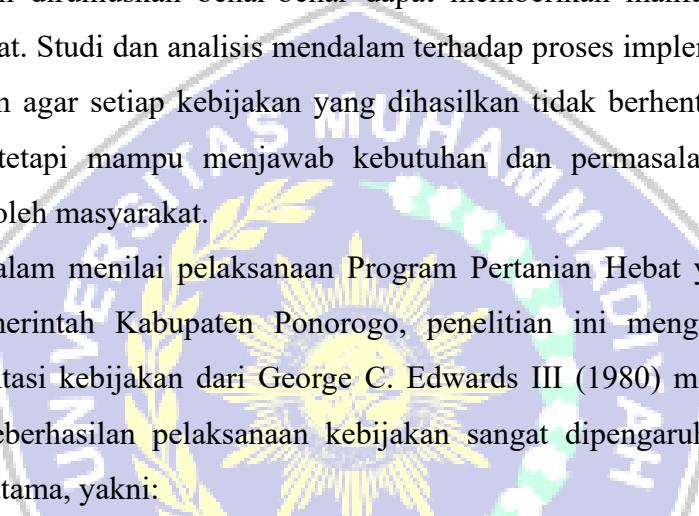
Dalam ranah studi kebijakan publik, tahapan implementasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis. Implementasi merupakan fase yang menjadi penentu utama keberhasilan suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirumuskan secara matang hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi menjadi sangat penting bagi para akademisi, praktisi, maupun pengambil keputusan di bidang kebijakan publik.

George C. Edwards III, seorang pakar terkemuka dalam bidang administrasi publik, pada tahun 1980 mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang kompleks, yang bertujuan untuk mengoperasionalkan keputusan-keputusan politik ke dalam bentuk program, proyek, atau kebijakan

yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Menurut Edwards, implementasi tidak hanya sebatas menjalankan instruksi administratif atau prosedural, tetapi merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan koordinasi dan interaksi antara berbagai aktor, baik individu maupun institusi, serta didukung oleh struktur organisasi dan sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya sekadar menjalankan perintah atau instruksi dari atasan, melainkan merupakan proses multi-dimensi yang membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Studi dan analisis mendalam terhadap proses implementasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam menilai pelaksanaan Program Pertanian Hebat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni:



Gambar 1.2. Model Implementasi Kebijakan George C Edwards III

Empat variabel tersebut merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Setyawan et al., (2021) dalam konteks implementasi kebijakan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari

pembuat kebijakan, kepada pelaksana dan pihak yang dituju. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pihak pelaksana program dan kelompok sasaran. Komunikasi yang jelas, tepat sasaran, dan berlangsung dua arah memungkinkan tujuan dan arah kebijakan disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Dalam hal ini, penyampaian informasi yang baik mampu meminimalkan terjadinya distorsi atau kesalahpahaman terhadap isi maupun maksud kebijakan. Jika kelompok sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang substansi program, maka tingkat resistensi terhadap kebijakan tersebut akan berkurang secara signifikan. Selain itu, tingkat kesalahan dalam pelaksanaan teknis di lapangan juga cenderung menurun karena para penerima kebijakan telah memahami prosedur dan tujuan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Di sisi lain, komunikasi yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi. Menurut Pradana & Nurharjadmo (2021), menyebutkan bahwa sumber daya dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan. Kebijakan publik memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Pelaksana kebijakan harus memiliki kapasitas teknis, pengalaman, serta keterampilan yang relevan agar mampu menjangkau dan melayani seluruh kelompok sasaran secara adil dan efisien. Tidak jarang kegagalan kebijakan di lapangan terjadi akibat pelaksana yang kurang profesional atau jumlah tenaga yang tidak proporsional. Selain itu, sumber daya keuangan juga memegang peran penting. Ketersediaan anggaran yang mencukupi akan menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diwujudkan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Tanpa dukungan dana yang stabil dan terdistribusi dengan baik, proses implementasi akan tersendat.

3. Sikap atau Disposisi Pelaksana

Aspek lain yang turut menentukan keberhasilan implementasi adalah disposisi atau sikap dan karakter para pelaksana kebijakan. Menurut

Turhidayani (2020), menjelaskan bahwa disposisi adalah sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana tidak mendukung kebijakan, maka terciptalah sikap yang abai terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap para pelaksana program (seperti petugas dinas, penyuluh pertanian, serta kepala desa) terhadap program yang dicanangkan bupati memiliki dampak besar terhadap efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana memiliki komitmen, integritas, dan kepekaan sosial dalam menjalankan tugasnya. Karakter pelaksana yang jujur, bertanggung jawab, serta demokratis akan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Pelaksana yang memiliki sikap terbuka terhadap masukan serta menjunjung tinggi nilai partisipatif akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan kelompok sasaran, sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan pun meningkat. Dengan begitu, resistensi atau penolakan yang biasanya muncul dari masyarakat dapat ditekan secara lebih efektif.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Dianti, (2024) struktur birokrasi adalah struktur birokrasi merupakan seperangkat karakteristik, norma, serta pola hubungan yang terbentuk dan berulang di dalam lembaga eksekutif, yang memiliki keterkaitan baik secara potensial maupun nyata dengan pelaksanaan kebijakan yang dijalankan. Struktur organisasi dan sistem kerja birokrasi menjadi faktor penentu apakah pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung sesuai prosedur atau tidak. Struktur yang terlalu rigid, kompleks, atau tidak tanggap terhadap permasalahan di lapangan dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam situasi ini, efisiensi kolaborasi antara institusi (pemerintah daerah, kelompok tani, BPP, dan lembaga keuangan setempat) menjadi elemen dari analisis pelaksanaan.

Struktur birokrasi merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi yang jelas, fleksibel, dan mendukung kebijakan yang sedang dijalankan sangat membantu dalam memastikan setiap sumber daya digunakan secara efisien.

Mekanisme kerja yang dituangkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh aktor pelaksana di lapangan. Ketika struktur birokrasi terlalu kaku atau tidak selaras dengan kebutuhan kebijakan, maka potensi tumpang tindih tanggung jawab atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan menjadi besar. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga, kejelasan tugas, serta pembagian wewenang menjadi aspek penting yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

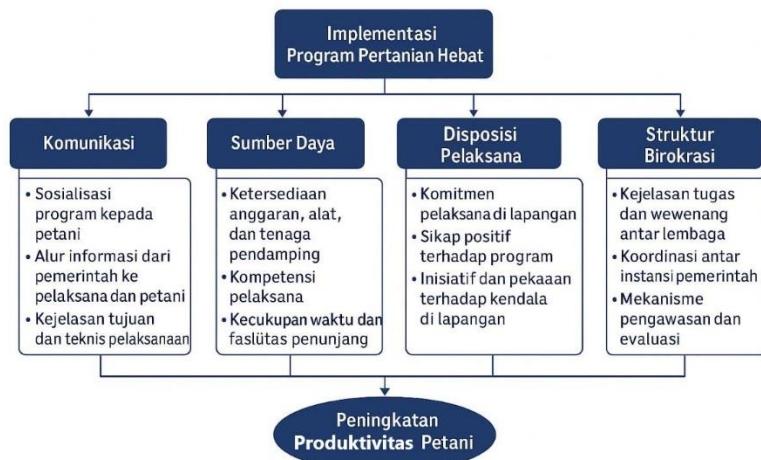
Salah satu bentuk implementasi Program *Nawa Dharma Nyata* yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021–2026 adalah sektor pertanian, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan. Program tersebut meliputi berbagai kegiatan seperti pembangunan embung desa, pengembangan irigasi air dalam tanah, penyediaan benih unggul, dan subsidi pupuk. Dari sisi komunikasi, program ini disosialisasikan melalui Musrenbang desa hingga kabupaten, serta melalui peran aktif dinas pertanian dan perangkat desa. Dari segi sumber daya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran serta melibatkan penyuluh pertanian dalam proses pendampingan. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen kepala desa dan kelompok tani dalam menjalankan program sesuai arahan. Sedangkan dalam aspek struktur birokrasi, program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Pertanian, Bappeda, dan perangkat kecamatan hingga desa, dengan prosedur teknis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan.

Dengan demikian, pendekatan Edwards III dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi Program *Nawa Dharma Nyata* di sektor pertanian.

H. Definisi Operasional

Dalam rangka memahami dan menganalisis pelaksanaan program bupati (*Nawa Dharma Nyata*) sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Ponorogo, berikut adalah kerangka atau alur berfikir yang menggambarkan implementasi program dengan peningkatan

produktivitas petani berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.



Gambar 1.3. Kerangka Analisis Implementasi Program Pertanian Hebat di Kabupaten Ponorogo

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Di samping itu, studi ini juga memasukkan satu variabel terikat, yaitu produktivitas petani, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program.

Komunikasi diartikan sebagai tingkat efektivitas, kejelasan, dan konsistensi penyampaian informasi mengenai program dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada petani serta pelaksana teknis di lapangan. Indikator dari variabel ini meliputi pengiriman informasi, kejelasan pesan, serta konsistensi dalam penerapan kebijakan. Komunikasi yang efektif sangat krusial untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan keterlibatan petani dalam program. Menurut Pramono, (2020) keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan agar pelaksana memahami apa yang harus dilakukan, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan perlu disampaikan kepada kelompok yang dituju, sehingga akan mengurangi penyimpangan pelaksanaan.

Sumber Daya mengacu pada tersedianya jumlah yang cukup dari berbagai bantuan yang diperlukan untuk melaksanakan program. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (seperti petugas penyuluhan

pertanian), anggaran, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta wewenang atau kuasa pelaksana dalam membuat keputusan. Program dapat berfungsi secara efektif apabila semua elemen sumber daya tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Hal ini selaras dengan gagasan menurut Hutagalung & Indrajat, (2022) bahwa setiap kebijakan harus didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang memadai.

Sikap Pelaksana mencerminkan komitmen dan kesediaan dalam menjalankan tugas kebijakan. Indikator pada variabel ini mencakup tingkat komitmen, kewajiban dalam melaksanakan tugas, serta tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan petani. Pelaksana yang memiliki semangat tinggi dan integritas cenderung lebih efektif dalam melaksanakan program serta tanggap terhadap tantangan di lapangan. Menurut Kogoya et al., (2024) menjelaskan jika para pelaksana memiliki kecenderungan positif atau sikap, atau dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan yang telah disepakati.

Struktur Birokrasi diartikan sebagai sistem organisasi dan tata cara kerja yang mendukung pelaksanaan program. Ini meliputi tersedianya Standar Prosedur Operasional (SOP), kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi, serta efisiensi dalam koordinasi antara lembaga yang menjalankan, seperti Dinas Pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani. Menurut Larry et al., (2022) SOP yang baik harus mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Sistem birokrasi yang efektif dan terencana akan mempercepat seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Produktivitas Petani, yang diartikan sebagai kemampuan petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian melalui program yang diikuti. Variabel ini berfungsi sebagai ukuran akhir dari keberhasilan Program Pertanian Hebat, karena hasil implementasi program akan tercermin dari seberapa signifikan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas petani, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas hasil panen.

Dalam penelitian ini, implementasi Program Bupati Ponorogo yang dikenal dengan *Nawa Dharma Nyata* di bidang pertanian dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan dan bentuk nyata kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Fokus utama penelitian ini terletak pada pelaksanaan program dan dampaknya terhadap produktivitas petani. Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan utama, antara lain:

1. Pembangunan irigasi air dalam tanah (sumur bor pertanian) di lahan-lahan produktif petani untuk mengatasi kekeringan.
2. Pembangunan embung desa sebagai upaya penyediaan dan pengelolaan sumber daya air untuk pertanian berkelanjutan.
3. Penyaluran bantuan subsidi pupuk kepada petani guna mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian.
4. Pemberian bantuan benih unggul untuk komoditas utama (padi, jagung, kedelai, dll).
5. Penyuluhan dan pelatihan pertanian melalui dinas teknis atau program pendampingan desa.
6. Revitalisasi jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan yang kompleks dan kontekstual, yakni *Program Pertanian Hebat* di Kabupaten Ponorogo. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial, interaksi antar aktor, serta dinamika kebijakan yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau data kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan institutionalism atau pendekatan institusi. Pendekatan institusionalisme (institutionalism) merupakan pendekatan dalam ilmu sosial, khususnya dalam studi kebijakan publik, ilmu politik, dan administrasi publik, yang menekankan peran penting lembaga (institusi) dalam memengaruhi perilaku, proses, dan hasil kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah

untuk memahami bagaimana lembaga pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, merancang dan menjalankan Program Pertanian Hebat sebagai bentuk implementasi kebijakan publik di sektor pertanian. Melalui pendekatan institutionalism, penelitian ini menekankan pada peran struktur, aturan formal dan informal, koordinasi birokrasi, serta kapasitas institusi pemerintah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III digunakan untuk menjelaskan sejauh mana elemen institusional seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam menentukan efektivitas implementasi program dan dampaknya terhadap produktivitas petani.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah implementasi utama, salah satu dari 9 program unggulan di Kabupaten Ponorogo, yang bernamakan Program Pertanian Hebat yang menjadi fokus penelitian. Desa Besuki, Kecamatan Sambit sebagai penerima manfaat program akan dijadikan lokasi pengambilan data.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan. Snowball sampling merupakan metode pengambilan informan secara bertahap melalui proses rujukan dari informan sebelumnya. Pada tahap awal, peneliti menetapkan beberapa informan kunci (*key informants*) yang memiliki pengetahuan memadai mengenai implementasi Program Pertanian Hebat, seperti penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, atau pejabat dinas terkait. Setelah memperoleh data awal, informan tersebut kemudian merekomendasikan individu lain yang dianggap relevan dan memiliki informasi tambahan yang dibutuhkan penelitian.

Teknik ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan pengalaman praktik dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan, yang sering kali hanya dipahami oleh aktor tertentu. Melalui snowball sampling, peneliti dapat mengakses jaringan informan yang lebih luas dan

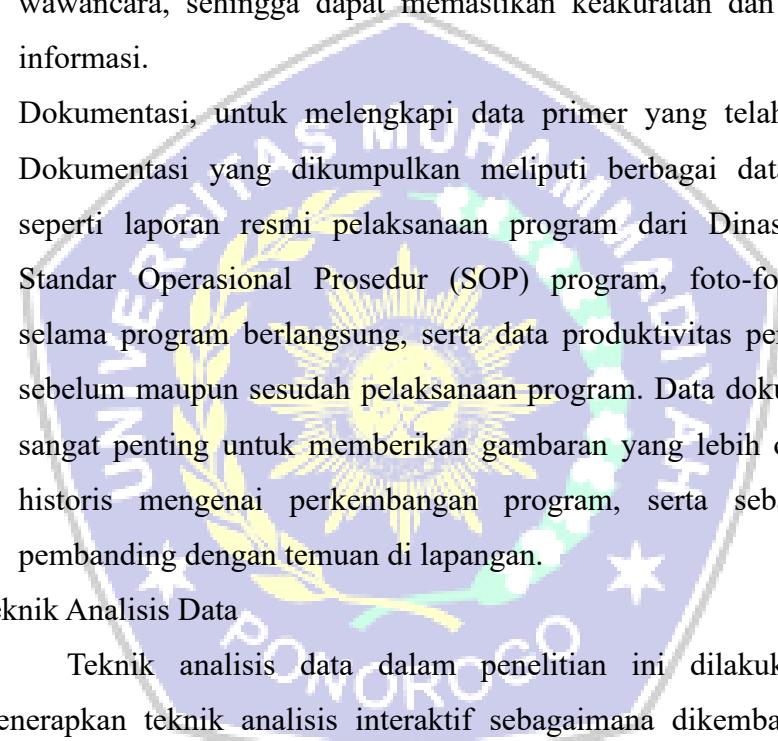
menemukan sumber informasi yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Selain itu, metode ini memungkinkan data yang diperoleh semakin kaya dan mendalam, seiring bertambahnya informan yang saling terhubung berdasarkan pengalaman, peran, dan keterlibatannya dalam Program Pertanian Hebat.

Dengan demikian, snowball sampling menjadi teknik yang efektif untuk menggali informasi dari aktor formal maupun nonformal yang memiliki kontribusi terhadap implementasi kebijakan, sehingga data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi secara lebih komprehensif. Jumlah informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan akan mengikuti prinsip saturasi data (data saturation). Artinya, proses pengumpulan data akan terus dilakukan hingga informasi yang diperoleh dari para informan dianggap sudah cukup, tidak ada lagi temuan atau isu baru yang muncul, dan data yang didapatkan telah menunjukkan pola yang konsisten. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mendalam, dan mampu menggambarkan realitas pelaksanaan Program Pertanian Hebat secara utuh dari berbagai sudut pandang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para informan utama yang telah dipilih secara purposive. Wawancara ini bertujuan untuk menggali secara lebih rinci pemahaman, pengalaman pribadi, serta berbagai tantangan atau hambatan yang dihadapi informan selama terlibat dalam pelaksanaan program. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang kaya, termasuk narasi, pendapat, serta saran dari para pelaku utama di lapangan, seperti petani penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparatur dinas, dan perangkat desa. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui pertanyaan tertulis, karena informan dapat menceritakan pengalaman dan pandangannya secara bebas dan terbuka.

- 
- b. Observasi, sebagai metode untuk mengamati secara langsung proses implementasi program di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir di tengah-tengah kegiatan pertanian, baik saat pelatihan, pendampingan, maupun saat penggunaan alat dan sarana prasarana yang diberikan oleh program. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana interaksi antar aktor kebijakan berlangsung, kondisi aktual petani dan lahan pertanian, serta dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaan program. Observasi juga membantu peneliti dalam memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara, sehingga dapat memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.
 - c. Dokumentasi, untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi berbagai data sekunder, seperti laporan resmi pelaksanaan program dari Dinas Pertanian, Standar Operasional Prosedur (SOP) program, foto-foto kegiatan selama program berlangsung, serta data produktivitas pertanian baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan program. Data dokumentasi ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan historis mengenai perkembangan program, serta sebagai bahan pembanding dengan temuan di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami dan mengelola data kualitatif secara mendalam dan terstruktur. Proses analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahapan utama yang berlangsung secara siklus dan saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Ajif, 2015).

- a. *Reduksi data*, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan terhadap data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan

fokus penelitian dipilih, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang tidak relevan, berulang, atau tidak mendukung tujuan penelitian akan dieliminasi. Reduksi data bertujuan untuk memadatkan dan memfokuskan data sehingga hanya informasi yang esensial dan mendukung analisis lebih lanjut yang dipertahankan. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah mengelola data yang jumlahnya besar dan kompleks.

- b. *Penyajian data*, yaitu menyajikan data tersebut dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti uraian naratif, tabel, matriks, grafik, maupun diagram. Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dan pembaca dalam melihat pola, hubungan antarkategori, serta kecenderungan yang muncul dari data. Dengan penyajian yang sistematis, proses interpretasi dan analisis lanjut menjadi lebih mudah dan terarah.
- c. *Penarikan kesimpulan dan verifikasi*, peneliti mulai melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari makna, pola, atau hubungan yang tersembunyi dalam data, serta membandingkan temuan dengan teori atau hasil penelitian terdahulu. Selain itu, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, pengecekan ulang data, atau diskusi dengan informan untuk mengonfirmasi kebenaran dan keabsahan temuan penelitian.

6. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menerapkan empat kriteria keabsahan data, meliputi:

- a. Kredibilitas, merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan diyakini mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti menerapkan beberapa strategi, antara lain

triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber yang berbeda, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dan memperkuat temuan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, member checking dilakukan dengan meminta para informan untuk memberikan konfirmasi atau klarifikasi terhadap data dan interpretasi yang telah dibuat peneliti, sehingga dapat memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan.

- b. Transferabilitas, berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk meningkatkan transferabilitas, peneliti memberikan deskripsi kontekstual secara rinci dan mendalam mengenai latar belakang penelitian, karakteristik lokasi, subjek, serta proses penelitian. Dengan deskripsi yang kaya dan terperinci, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah temuan penelitian ini relevan dan dapat digunakan sebagai referensi di tempat atau situasi lain yang mirip.
- c. Dependabilitas, mengacu pada konsistensi proses penelitian, yaitu sejauh mana proses penelitian dapat dilacak dan diaudit oleh peneliti lain. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti menyusun audit trail atau jejak audit yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan adanya audit trail yang jelas, peneliti lain dapat melakukan penelusuran ulang terhadap proses penelitian dan memastikan bahwa setiap langkah telah dilakukan secara sistematis dan konsisten.
- d. Konfirmabilitas, bertujuan untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian benar-benar berasal dari informasi yang diperoleh di lapangan, bukan hasil bias, keinginan, atau opini pribadi peneliti. Untuk mencapai konfirmabilitas, peneliti menyimpan catatan data mentah,

hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga dapat diaudit oleh pihak lain. Selain itu, peneliti juga melakukan refleksi diri secara terus-menerus untuk menghindari subjektivitas dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid.

